
**ANALISIS DISKRIMINAN SEKTOR EKONOMI PEMBENTUK KATEGORI INDEKS
KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD) PROPINSI DI INDONESIA**

Oleh :

Budi Santoso

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

E-mail: budivivace@gmail.com

Articel Info

Article History :

Received 24 February - 2022

Accepted 24 March - 2022

*Available Online 30 March -
2022*

Abstract

The policies of a local government certainly have an impact on various aspects that exist in the area. Including the aspect of measuring regional fiscal capacity (RFC) as a measure of the ability of a region which is reflected through regional revenues minus revenues whose use has been determined and certain expenditures. The rise and fall of the regional fiscal capacity (RFC) of a province compared to other provinces can be caused by many factors, such as fiscal policy factors, natural resource wealth, and one of them is the economic sector performance factor in the province. Therefore, this study aims to determine the differences in RFC categories between provinces in Indonesia, find out what economic sectors can discriminate against RFC categories in provinces, in Indonesia, and determine the ability of the discriminant function in categorizing RFC provinces in Indonesia. The research method used is descriptive method in order to get an overview of the economic sector and fiscal capacity in all provinces in Indonesia. Then proceed with discriminant analysis to find out how the differences in RFC between provinces and which economic sectors can discriminate against RFC categories in provinces in Indonesia. The results showed that there were significant differences in the RFC category between provinces in Indonesia. The sectors that most determine the different categories of provincial RFC in Indonesia are wholesale and retail trade; car and motorcycle repair.

Keywords :

*Discriminant Analysis, Fical
Policy, Regional Fiscal
Capacity, Economic Sector.*

1. PENDAHULUAN

Dimensi pokok dari pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pola kegiatan masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri (AlFarabi *et al.*, 2014). Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seringkali diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi juga diyakini memberikan dampak pada pergeseran struktur ekonomi. Stabilitas perekonomian regional suatu daerah memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dalam pembangunan. Menurut Koerniawan *et al.* (2020) pembangunan ekonomi daerah mengacu pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Otonomi daerah adalah sebagai bentuk tanggung jawab daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi di setiap daerah. Tentang otonomi daerah ini Akbal (2016) menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan yang ada di masing-masing daerah, maka pemerintah daerah berwenang mengelola struktur ekonomi di daerahnya. Indikator keberhasilan Pembangunan ekonomi selain diukur dari PDRB per kapita, juga berhubungan dengan struktur ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Alasannya adalah, dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi (yang berarti usaha pola perubahan menuju peningkatan) juga ikut berkembang (Gunawan *et al.*, 2018). Contohnya, bertumbuhnya ekonomi mengakibatkan sektor pertanian digantikan dengan sektor industri maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan bertumbuhnya ekonomi.

Penting bagi pemerintah untuk menjaga struktur PDRB, sehingga nilai tambah dari struktur perekonomian bisa mendorong pendapatan bagi daerah tersebut. Dengan pendapatan yang baik maka kapasitas fiskal daerah juga baik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengetahui sektor lapangan usaha manakah yang memberikan sumbangan besar pada kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1). Apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk kategori KFD antar propinsi di Indonesia?, 2). Sektor ekonomi manakah yang bisa mendiskriminasi kategori KFD propinsi di Indonesia? dan 3). Apakah fungsi diskriminan yang dihasilkan mampu mengkategorikan KFD propinsi di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk memastikan adanya perbedaan kategori KFD antar propinsi di Indonesia, 2). Mengetahui sektor ekonomi yang bisa mendiskriminasi kategori KFD propinsi, dan 3). Mengetahui kemampuan fungsi diskriminan dalam mengkategorikan KFD.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menghitung nilai tambah dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan satu waktu tertentu (Gunawan *et al.*, 2018). Sementara Koerniawan *et al.* (2020) juga mengungkapkan bahwa PDRB berfungsi untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah atau daerah. Dengan demikian melihat kemajuan suatu daerah bisa dilihat dengan cara mengamati PDRB daerah tersebut.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari waktu ke waktu memberikan gambaran tentang perkembangan kegiatan setiap lapangan usaha menghasilkan barang dan jasa (Widyaningsih, 2018). Pertimbangan para pemilik modal dalam menanamkan dananya di suatu daerah dikarenakan adanya keunggulan faktor ekonomi di daerah itu. Keunggulan ekonomi itu bisa berupa potensi pasar, sumberdaya alam, dan daya saing. Para investor bisa melihat potensi daerah melalui komposisi PDRB sebagai manifestasi pendapatan daerah bersarkan jenis lapangan usaha yang ada di daerah tersebut.

PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat melalui kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan masyarakat (Oktavia, 2014). PDRB suatu daerah bisa lebih tinggi atau lebih rendah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Daerah yang memiliki PDRB yang tinggi menunjukkan daerah tersebut lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan daerah yang memiliki PDRB yang lebih rendah. Bahkan daerah dengan PDRB yang rendah bisa memberikan indikator bahwa daerah tersebut tidak mandiri.

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga yang berlaku dari seluruh lapangan usaha yang mencakup 17 kategori, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2). Pertambangan dan Penggalan, 3). Industri Pengolahan, 4). Pengadaan Listrik dan Gas, 5). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur, 6). Konstruksi, 7). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8). Transportasi dan Pergudangan, 9). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10). Informasi dan Komunikasi, 11). Jasa Keuangan dan Asuransi, 12). Real Estat, 13). Jasa Perusahaan, 14). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15). Jasa Pendidikan, 16). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17). Jasa lainnya.

Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pembangunan ekonomi secara berkelanjutan akan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi atau disebut juga sebagai perubahan struktural (Pratiwi, 2021). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. PDRB ini bertujuan untuk melihat struktur perekonomian suatu daerah (Suryani *et al.*, 2019). Sektor-sektor perekonomian akan mengalami perubahan selama berlangsungnya proses pembangunan. Perubahan struktur perekonomian meliputi pergeseran dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, dari perusahaan perseorangan beralih menjadi perusahaan yang memiliki badan hukum dan sebagainya.

Penelitian transformasi struktur ekonomi yang dilakukan oleh Sulfaidah *et al.*, (2021)

adalah dengan menggunakan data PDRB berdasarkan lapangan usaha. Setiap wilayah perlu melihat sektor ekonomi atau lapangan usaha apa yang memiliki potensi besar dan dapat memberikan keunggulan untuk bisa dikembangkan. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumberdaya yang ada juga menjadi berkurang (Rahayu, 2021).

Transformasi struktural dapat juga disebut sebagai perubahan struktur ekonomi merupakan proses perubahan pada sektor-sektor ekonomi antara sektor ekonomi yang satu dengan sektor ekonomi yang lain (Mardiana, *et al.*, 2017). Jika salah satu sektor ekonomi mengalami perubahan, maka hal itu bisa mendorong terjadinya perubahan pada sektor ekonomi yang lain. Misalnya, kemajuan di sektor pertanian bisa mendorong kemajuan di sektor industri. Kemajuan sektor industri bisa memicu terjadinya perkembangan pada sektor jasa. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu terus mendorong terjadinya peningkatan kinerja perekonomian di daerahnya serta melakukan pembangunan yang mendukung peningkatan sektor-sektor ekonomi sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing.

Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan merosotnya pangsa pasar sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa pasar sektor sekunder (industri), dan pangsa pasar sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan. Model perubahan struktural mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan aspek dari perubahan struktural karena adanya pergeseran permintaan dan alokasi sumberdaya (Alfarabi, *et al.*, 2014). Sehingga perubahan struktur ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perubahan ini juga bisa menyebabkan peningkatan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan, termasuk peningkatan penerimaan dari sektor fiskal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sektor yang lebih diunggulkan adalah sektor industri. Hal itu disebabkan sektor industri memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang relatif lebih banyak dibandingkan sektor yang lain (Muhammad, 2017).

Kapasitas Fiskal Daerah

Hakekat otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah dalam pengelolaan

daerah, menimbulkan dampak akan adanya tingkat kesiapan fiskal di setiap daerah. Sehingga setiap daerah harus memahami kapasitas fiskal di daerahnya masing-masing. Kapasitas fiskal daerah menurut PMK Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatn yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai. PMK Nomor 120/PMK.07/2020 menyatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Syaifullah (2021) menambahkan bahwa konsep kapasitas fiskal berfokus pada kemampuan suatu negara/daerah untuk menjalankan defisit fiskal. Sebuah negara/daerah tentu saja bisa mengatasi kendala fiskal yang ketat dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran atau meningkatkan tambahan pendapatan. Keberagaman sumber daya di masing-masing daerah adalah sebuah keniscayaan. Setiap daerah perlu mengatur bagaimana daerah memperoleh pendapatan dan bagaimana menggunakan pendapatan tersebut sebaik mungkin sesuai prioritas di masing-masing daerah. Tugas dan kewajiban pemerintah bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan pendapatan daerah yang memadai, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan setiap daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya (Pujawati *et al.*, 2019).

Dalam desentralisasi fiskal, permasalahan utama yang harus diperhatikan adalah mengenai kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Hal ini dikarenakan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal merupakan bagian penting dalam penentuan transfer ke daerah (Herdiyana, 2019). Terdapat banyak cara dalam mengukur kapasitas fiskal, seperti dengan menggunakan basis pajak utama dan tingkat tariff pajak standar (rata-rata). Peraturan menteri keuangan menyebutkan bahwa penghitungan kapasitas daerah sama dengan pendapatan dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Peta kapasitas daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah dikonversi menjadi indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) dan dikategori dengan menggunakan metode *interquartile range* (Herdiyana, 2019). Berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah provinsi, kemudian dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Rentang dan Kategori IKFD

Rentang IKFD	Kategori KFD
$IKFD < 0,304$	Sangat rendah
$0,304 \leq IKFD < 0,445$	Rendah
$0,445 \leq IKFD < 0,808$	Sedang
$0,808 \leq IKFD < 1,564$	Tinggi
$IKFD > 1,564$	Sangat tinggi

Sumber: Permenkeu, No. 126/PMK.07/2019 dan 120/PMK.07/2020 tentang Peta KFD.

Penelitian Terkait

Widyaningsih (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik bruto terhadap kapasitas fiskal di Kota Pontianak selama kurun waktu 2012-2016. Hasilnya menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik bruto berpengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal di Kota Pontianak.

Herdiyana (2019) juga melakukan penelitian tentang kapasitas fiskal daerah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) bagi provinsi adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sedangkan bagi kab./kota adalah PAD, DAU (Dana Alokasi Umum), dan DBH.

Penelitian tentang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016 juga pernah dilakukan oleh Pujiwati *et al.* (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal di Lombok Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang, artinya Lombok Timur

masih belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh sumber keuangan.

Dalam 10 tahun terakhir (2010-2019), kapasitas fiskal dan ruang fiskal Pemerintah Kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahun (Fanggidae, 2020). Peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan ruang fiskal daerah.

Saifullah (2021) melakukan penelitian tentang Kapasitas Fiskal Daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas fiskal di Kabupaten Langkat mampu dijelaskan oleh

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu diperoleh dari BPS masing-masing propinsi. Data yang digunakan adalah PDRB menurut lapangan usaha seluruh propinsi di Indonesia pada tahun 2020. Adapun untuk data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) propinsi tahun 2020, diperoleh dari permenkeu Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kategori Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Propinsi di Indonesia tahun 2020 dari 34 propinsi. Kapasitas Fiskal Daerah merupakan data kategorikal sebagai gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah propinsi melalui pendapatan daerah dikurangi dengan

variabel-variabel jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Realisasi Penerimaan Daerah serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Penelitian tentang Kapasitas Fiskal Daerah juga dilakukan (Saparmen *et al.*, 2022) untuk Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau pada tahun 2011-2020. Hasil penelitiannya menunjukkan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara belanja barang tidak berpengaruh.

pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Propinsi diukur dengan menggunakan ketentuan Permenkeu Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, di mana KFD propinsi di Indonesia dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi.

4. HASIL PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Tabel berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif yang berisi tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi 17 variabel sektor perekonomian 34 propinsi di Indonesia tahun 2020

Tabel 2: Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistic*) – Dalam Milyar Rupiah.

No.	Variabel Independen	Min	Max	Rata-Rata	Stddev
1	PtnHutlkn	2.300,50	273.572,00	59.617,31	67.562,92
2	PertGali	468,20	251.602,43	29.262,37	48.184,47
3	IndPolah	1.367,30	860.070,60	107.673,46	199.565,31
4	Pdalisrgas	18,46	10.511,22	1.373,60	2.962,37
5	Pdairsmph	16,60	2.156,07	395,83	512,27
6	Konstruk	2.928,33	312.384,42	48.860,20	68.446,25
7	PrdgBsrEcr	4.678,90	460.737,97	66.246,08	112.037,96
8	TransGudg	622,27	109.147,85	17.957,42	25.653,66
9	PeAkmdsMkn	104,76	128.334,00	14.198,87	30.161,81
10	InKom	1.145,00	260.973,76	22.484,35	48.758,57
11	JsKauAsr	1.066,18	312.370,57	19.552,03	53.836,36
12	RealEst	42,95	174.917,26	14.688,03	31.159,57
13	JsPersh	5,82	245.156,33	9.264,82	41.852,02
14	AdmPmrthPrthn	2.621,61	146.981,11	18.783,34	25.536,44
15	JsPend	1.377,03	145.307,67	17.282,15	29.127,61
16	JsKshtSos	735,65	58.739,40	6.145,26	10.205,18
17	JsLain	255,51	109.643,20	8.180,91	20.092,02

Sumber: Data diolah, PDRB menurut Lapangan Usaha 2020.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020, untuk lapangan usaha PrdgBsrEcr (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) memiliki

nilai Min (minimum) yang tertinggi dibandingkan dengan sektor usaha yang lain, yaitu Rp. 4.678,90 Milyar. Akan tetapi pada tahun 2020, sektor usaha IndPolah (Industri

Pengolahan) memiliki nilai maksimum dan nilai rata-rata yang paling tinggi, yaitu Rp. 860.070,60 Milyar dan Rp. 107.673,46 Milyar.

Tabel berikutnya adalah posisi kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) dari 34 propinsi di Indonesia pada tahun 2020.

Tabel 3: Jumlah Propinsi Menurut Kategori KFD

Kategori KFD	Jumlah Propinsi
Sangat rendah (SR)	9
Rendah (R)	8
Sedang ((S)	8
Tinggi (T)	5
Sangat tinggi (ST)	4
Jumlah	34

Sumber: Data diolah, IKFD 2020.

Dari Tabel tersebut terlihat propinsi dengan indeks KFD dalam kategori Sangat Rendah, Rendah dan Sedang jumlahnya paling banyak, yaitu 9 propinsi untuk kategori sangat rendah, 8 propinsi untuk kategori rendah, dan 8 propinsi juga untuk kategori sedang. Sementara untuk kategori Tinggi ada 5 propinsi dan kategori Sangat Tinggi dialami oleh 4 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Uji Asumsi Analisis Diskriminan

Sebelum dilakukan analisis diskriminan, terlebih dahulu akan dilakukan beberapa uji asumsi, yaitu dilakukan uji normalitas, uji perbedaan atau kesamaan rata-rata pada setiap kelompok, uji kesamaan kovarian matriks, dan uji multikolirietas antar variabel independen. Uji asumsi ini harus terpenuhi sehingga hasil analisis diskriminan bisa digunakan untuk mengetahui struktur APBD yang manakah yang memiliki kemampuan memberikan perbedaan pada kategori KFD.

Variabel independen penelitian ini adalah sebanyak 17 variabel, sebagaimana jumlah lapangan usaha yang ada di struktur APBD propinsi. Untuk mendapatkan asumsi data struktur APBD yang berdistribusi normal, terlebih dahulu data struktur APBD yang asli ditransformasi menjadi LN (*Log Natural*). Setelah data variabel independen menjadi LN, selanjutnya dilakukan uji normalitas terhadap 17 variabel independen. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorow Smirnov, hasilnya adalah ada 4 variabel independen yang memiliki distribusi tidak normal. Keempat variabel independen (lapangan usaha) ini kemudian dikeluarkan dari model diskriminan, sehingga tinggal menjadi 13 variabel. Adapun hasil uji normalitas dari 13 lapangan usaha ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Uji Normalitas (*Tests of Normality*)

Variabel Independen	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Ln_PtnHutkn	.080	34	.200*	.974	34	.592
Ln_PertGali	.122	34	.200*	.964	34	.327
Ln_IndPolah	.116	34	.200*	.971	34	.491
Ln_Pdalistrigas	.128	34	.170	.926	34	.024
Ln_Pdairsmp	.054	34	.200*	.987	34	.957
Ln_Konstruk	.122	34	.200*	.963	34	.301
Ln_PrdgBsrEcr	.141	34	.085	.929	34	.029
Ln_TransGudg	.101	34	.200*	.977	34	.682
Ln_PeAkmdsMkn	.099	34	.200*	.975	34	.602
Ln_InKom	.099	34	.200*	.946	34	.093
Ln_RealEst	.133	34	.136	.956	34	.189
Ln_JsPers	.084	34	.200*	.984	34	.884
Ln_JsKshtSos	.124	34	.200*	.952	34	.145

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji normalitas digunakan untuk mencari tahu apakah data penelitian yang didapatkan di lapangan termasuk dalam kategori distribusi normal atau tidak. Untuk menguji kenormalan data variabel independen digunakan H_0 = Data variabel berdistribusi normal. Adapun untuk penentuannya adalah dengan menggunakan angka Asymp. Sig. (2-tailed) dengan pedoman

sebagai berikut: Jika nilai probabilitas atau sig. > α (alpha) 0,05 maka H_0 diterima, yang berarti data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < atau = alpha 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov menghasilkan angka signifikansi (sig.)

> α (alpha) 0,05 pada semua variabel, sehingga H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu 13 variabel independen (lapangan usaha) hasil transformasi datanya telah berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji kesamaan rata-rata kelompok (*Tests of Equality of Group Means*) untuk masing-masing variabel pada

Tabel 5: Uji kesamaan rata-rata kelompok (*Tests of Equality of Group Means*)

	<i>Wilks' Lambda</i>	F	df1	df2	Sig.
Ln_PtnHutkn	.657	3.780	4	29	.014
Ln_PertGali	.615	4.533	4	29	.006
Ln_IndPolah	.416	10.168	4	29	<.001
Ln_Pdalisrgas	.425	9.812	4	29	<.001
Ln_Pdairsmp	.429	9.647	4	29	<.001
Ln_Konstruk	.247	22.097	4	29	<.001
Ln_PrdgBsrEcr	.189	31.127	4	29	<.001
Ln_TransGudg	.275	19.090	4	29	<.001
Ln_PeAkmdsMkn	.361	12.843	4	29	<.001
Ln_InKom	.237	23.378	4	29	<.001
Ln_RealEst	.451	8.821	4	29	<.001
Ln_JsPersh	.509	6.987	4	29	<.001
Ln_JsKshtSos	.289	17.869	4	29	<.001

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji kesamaan rata-rata kelompok (*test of equity groups means*) digunakan untuk melihat apakah secara univariave ada perbedaan kategori KFD dilihat dari ke-12 variabel independen. Uji kesamaan rata-rata kelompok bisa menggunakan indikator *Wilk's Lambda* dan angka F. Dalam pengujian ini, yang diuji adalah kesamaan rata-rata variabel independen pada setiap kategori KFD (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan tinggi) sebagai variabel dependen, dan bukan rata-rata antar variabel. Pedoman pengujiannya, jika angka *Wilk's Lambda* mendekati 0 dan sig. < alpha 0,05, maka rata-rata data cenderung berbeda pada setiap kelompok. Sebaliknya, jika angka *Wilk's Lambda* mendekati 1, dan sig. > alpha 0,05, maka rata-rata setiap variabel cenderung sama di setiap kelompok. Kemudian jika menggunakan angka F, semakin tinggi angka F maka angka sig. akan semakin kecil jauh di bawah alpha 0,05, dan hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pada setiap kategori KFD Propinsi di Indonesia.

Pada Tabel di atas terlihat bahwa angka *Wilk's Lambda* terkecil sebesar 0,189 dengan

setiap kelompok. Analisis diskriminan mensyaratkan setiap variabel harus memiliki rata-rata (*means*) yang berbeda pada setiap kelompok, baru variabel tersebut bisa dimasukkan dalam model diskriminan. Hasil uji kesamaan rata-rata kelompok (*Tests of Equality of Group Means*) adalah sebagai berikut:

angka F paling besar, yaitu 31,127 ada pada variabel Ln_PrdgBsrEcr dengan angka signifikansi jauh dibawah 0,05. Kemudian angka *Wilk's Lambda* paling tinggi adalah 0,657 dan angka F paling rendah adalah 3,780 yang pada variabel Ln_PtnHutkn dengan angka sig. 0,014 < 0,05. Karena semua variabel memiliki angka sig. < dari 0,05, hal ini berarti semua variabel independen memiliki rata-rata yang berbeda dengan sangat signifikan pada setiap kategori KFD (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan tinggi) propinsi. Hasil seperti ini juga berarti ke-12 variabel independen ternyata mampu membedakan (mendiskriminasi) variabel dependen kategori KFD (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan tinggi).

Kemudian syarat berikutnya adalah matriks *covariance* setiap grup harus sama. Untuk membuktikan asumsi ini digunakan *Log Determinan* dan statistik *Box's M*. Adapun hipotesa dalam pengujian ini adalah $H_0 =$ Matriks *covariance* setiap grup sama.

Tabel 6: Log Determinants

Kategori KFD	Rank	Log Determinant
Sangat Rendah	1	-.973
Rendah	1	-2.684
Sedang	1	-.791
Tinggi	1	-.593
Sangat Tinggi	1	-1.755
Pooled within-groups	1	-1.126

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices.

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa semakin besar *Log Determinants* akan semakin tinggi pula perbedaan grup *covariance* matrik. Kolom rank menunjukkan jumlah variabel independen, dalam hal ini adalah 1 (satu) variabel independen. Sebagaimana diketahui, analisis diskriminan memiliki asumsi bahwa terdapat kesamaan (homogenitas) matrik *covariance* antar grup. Untuk menguji asumsi ini bisa menggunakan statistic Box's M berikut ini:

Tabel 7: Test Results

Box's M		7.090
F	Approx.	1.646
	df1	4
	df2	938.350
	Sig.	.161

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

Sumber: Data diolah, 2021.

Pada Tabel di atas terlihat nilai Box's M adalah sebesar 7,090 dengan nilai signifikansi 0,161 atau lebih besar dari pada 0,05. Sehingga keputusannya adalah menerima H_0 dan hal ini berarti matriks *covariance* setiap kategori KFD

adalah sama. Dengan demikian kriteria mengenai kesamaan matriks *covariance* telah terpenuhi dan analisis diskriminan bisa dilakukan.

Analisis diskriminan juga memiliki asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen (multikolienaritas). Indikator ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen adalah apabila nilai korelasi antar variabel independen adalah < 0.8 . Hipotesanya adalah H_0 : Terdapat korelasi antar variabel independen. Korelasi antar variabel independen bisa dilihat pada Tabel 8. Dari Tabel tersebut terlihat korelasi variabel Ln_Konstruk (Bidang konstruksi) dengan Ln_PrdgBsrEcr (Bidang Perdagangan Besar dan Eceran) yang mencapai sebesar 0,805 (lebih dari 0,8). Hal ini berarti kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat (terjadi multikolinearitas). Oleh karena itu salah satu dari variabel tersebut harus dikeluarkan dari model analisis, dalam hal ini variabel Ln_Konstruk (Bidang konstruksi). Dengan dikeluarkan variabel ini, maka jumlah variabel independen dalam model diskriminan menjadi tinggal sebanyak 12 variabel. Sehingga korelasi antar variabel independen menjadi sebagai berikut:

Tabel 8: Korelasi antar variabel independen

Pooled Within-Groups Matrices													
		Ln_PtnHutkn	Ln_PertGali	Ln_IndPolah	Ln_Pdalisgras	Ln_Pdairsmp h	Ln_PrdgBsrEcr	Ln_TransGudg	Ln_PeAkmds Mkn	Ln_InkKom	Ln_RealEst	Ln_JsPers h	Ln_Jsk'shtSos
Correlation	Ln_PtnHutkn	1.000	.279	.271	.006	.185	.272	.045	.025	-.050	.038	-.155	-.142
	Ln_PertGali	.279	1.000	.452	.108	.158	.227	.046	-.119	-.172	-.127	-.283	-.237
	Ln_IndPolah	.271	.452	1.000	.701	.502	.671	.360	.477	.396	.437	-.059	.245
	Ln_Pdalisgras	.006	.108	.701	1.000	.524	.775	.639	.740	.646	.629	.186	.545
	Ln_Pdairsmp h	.185	.158	.502	.524	1.000	.472	.441	.458	.499	.352	.338	.382
	Ln_PrdgBsrEcr	.272	.227	.671	.775	.472	1.000	.688	.617	.619	.662	.332	.598
	Ln_TransGudg	.045	.046	.360	.639	.441	.688	1.000	.670	.486	.536	.534	.672
	Ln_PeAkmds Mkn	.025	-.119	.477	.740	.458	.617	.670	1.000	.597	.698	.415	.635
	Ln_InkKom	-.050	-.172	.396	.646	.499	.619	.486	.597	1.000	.685	.528	.719
	Ln_RealEst	.038	-.127	.437	.629	.352	.662	.536	.698	.685	1.000	.391	.710
	Ln_JsPers h	-.155	-.283	-.059	.186	.338	.332	.534	.415	.528	.391	1.000	.533
	Ln_Jsk'shtSos	-.142	-.237	.245	.545	.382	.598	.672	.635	.719	.710	.533	1.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Terlihat semua variabel memiliki korelasi $< 0,8$, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan variabel independen tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi

multikolinearitas. Sehingga ke 12 variabel bisa dimasukkan dalam model diskriminan.

Analisis Diskriminan Prosedur Pembentukan model Diskriminan

Dalam pembentukan model diskriminan, metode yang digunakan adalah metode stepwise. Untuk mengetahui variabel mana

yang paling efisien untuk dimasukan ke dalam model persamaan diskriminan, digunakanlah Tabel berikut ini:

Tabel 9: *Variables Entered/Removed*

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Statistic	df1	df2	Sig.
1	Ln_Pr dgBsrEcr	.937	Sangat Rendah and Rendah	3.968	1	29.000	.056

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 10: *Variables in the Analysis*

Step	Tolerance	Sig. of F to Remove
1	Ln_Pr dgBsrEcr	1.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 11: *Wilks' Lambda* dari Metode *Stepwise*

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	.189	1	4	29	31.127	4	29.000	<.001

Sumber: Data diolah, 2021.

Pada Tabel *Entered/Removed* dan Tabel *in the Analysis*, terlihat prosedur pembentukan model hanya sampai pada satu *step* dan variabel yang dimasukan dalam model persamaan diskriminan hanya variabel Ln_Pr dgBsrEcr. Kemudian pada Tabel *Wilk's Lambda* terlihat, hanya ada 1 (satu) variabel yang masuk dalam model diskriminan dan memiliki sig. yang jauh lebih kecil dari 0,05. Sementara variabel independen yang lain tidak masuk dalam model

persamaan diskriminan. Hal ini menunjukan variabel Ln_Pr dgBsrEcr mampu mempengaruhi tinggi rendahnya kategori KFD propinsi (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi).

Model Diskriminan

Untuk menunjukan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, bisa dilihat pada Tabel *Eigenvalues* berikut ini

Tabel 12: *Eigenvalues*

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	4.293 ^a	100.0	100.0	.901

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan *canonical correlation* diperoleh adalah sebesar 0,901. Nilai korelasi kanonikal (*canonical correlation*) sebesar 0,901 (mendekati 1) menunjukkan hubungan yang sangat tinggi antara nilai diskriminan dengan kelompok. Dengan angka korelasi kanonikal ini kemudian bisa digunakan untuk menentukan sebagai nilai koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) ini gunanya untuk melihat seberapa besar keragaman variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya. Berdasarkan *Canonical Correlation*, maka nilai R squared

adalah $0,901^2 = 0,812$. Hal ini berarti variasi kategori KFD propinsi, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi, 81,2% bisa dijelaskan oleh variabel Ln_Pr dgBsrEcr. Sedangkan sisanya, yaitu 8,8% dijelaskan variabel independen lainnya yang ada diluar model diskriminan.

Untuk melihat seberapa besar peran variabel Ln_Pr dgBsrEc menghasilkan perbedaan kategori KFD propinsi adalah dengan menggunakan Tabel *Wilk's Lambda* berikut ini

Tabel 13: *Wilks' Lambda* dari Fungsi Diskriminan.

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	.189	49.993	4	<.001

Sumber: Data diolah, 2021.

Pada Tabel *Wilks' Lambda* dari Fungsi Diskriminan terlihat dengan 1 (satu) fungsi ini menunjukkan angka Chi-square sebesar 49,993 dengan angka signifikansi 0,001 jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan perbedaan yang signifikan bahwa model diskriminan antara ke-5 kategori KFD pada model diskriminan yang dihasilkan. Dengan kata lain, model diskriminan yang dihasilkan secara signifikan mampu membedakan kategori KFD propinsi.

Kemudian untuk mengetahui variabel independen manakah yang masuk dalam model diskriminan yang hanya 1 (satu) fungsi, bisa menggunakan Tabel berikut ini:

Tabel 14: *Structure Matrix*

	Function 1
Ln_PrdgBsrEcr	1.000
Ln_Pdalistrgas ^a	.775
Ln_TransGudg ^a	.688
Ln_IndPolah ^a	.671
Ln_RealEst ^a	.662
Ln_InKom ^a	.619
Ln_PeAkmdsMkn ^a	.617
Ln_JsKshtSos ^a	.598
Ln_Pdairsmph ^a	.472
Ln_JsPers ^a	.332
Ln_PtnHutkn ^a	.272
Ln_PertGali ^a	.227
Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions Variables ordered by absolute size of correlation within function. a. This variable not used in the analysis.	

Sumber: Data diolah, 2021.

Matrik struktur (*structure matrix*) berguna untuk menilai peran dari semua variabel, variabel manakah yang perannya paling rendah hingga paling tinggi dalam mendiskriminasi variabel dependen, yaitu kategori KFD. Pada Tabel *Structure Matrix* hampir semua variabel diberikan tanda a, yang artinya variabel tersebut tidak digunakan atau tidak berperan dalam mendiskriminasi kategori KFD. Satu-satunya variabel yang tidak diberi tanda a adalah variabel Ln_PrdgBsrEcr. Hal ini berarti hanya variabel independen inilah yang masuk dalam fungsi diskriminan. Sehingga

dapat dinyatakan bahwa variabel Ln_PrdgBsrEcr memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendiskriminasi kategori IKFD propinsi.

Untuk model diskriminan yang dihasilkan, bisa menggunakan *standardized canonical discriminant function coefficients* atau *unstandardized coefficients*. Untuk model yang pertama, yaitu *standardized canonical discriminant function coefficients* bisa dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 15: *Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients*

	Function 1
Ln_PrdgBsrEcr	1.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Fungsi diskriminan dengan menggunakan *standardized canonical discriminant function coefficients* modelnya adalah:

$$Z \text{ Score} = 1 (\text{Ln_PrdgBsrEcr}).$$

Artinya, variabel Ln_PrdgBsrEcr mempunyai pengaruh positif. Sehingga, setiap kenaikan satu satuan nilai variabel Ln_PrdgBsrEcr, maka akan menaikkan skor diskriminan sebesar 1. Sebaliknya kalau Ln_PrdgBsrEcr turun satu satuan nilai, maka skor diskriminan juga akan turun 1.

Kemudian fungsi diskriminan dengan *unstandardized coefficient discriminant functions* ada pada Tabel:

Tabel 16: *Canonical Discriminant Function Coefficients*

	Function 1
Ln_PrdgBsrEcr	1.756
(Constant)	-26.056
<i>Unstandardized coefficients</i>	

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari Tabel tersebut maka dapat fungsi diskriminan dengan *unstandardized coefficient discriminant functions* modelnya adalah:

$$Z \text{ Score} = -26,056 + 1,756 (\text{Ln_PrdgBsrEcr})$$

Dengan koefisien variabel Ln_PrdgBsrEcr sebesar 1,756 (positif), maka

jika terjadi kenaikan satu satuan nilai variabel Ln_PrdgBsrEcr, maka akan menaikkan skor diskriminan sebesar 1,756. Akan tetapi, jika Ln_PrdgBsrEcr tidak mengalami kenaikan, maka skor diskriminan akan turun sebesar 26,056.

Untuk melihat rata-rata masing-masing kelompok adalah dengan menggunakan Tabel berikut ini:

Tabel 17: *Functions at Group Centroids*

Kategori KFD	Function
	1
Sangat Rendah (SR)	-1.958
Rendah (R)	-.990
Sedang (S)	.260
Tinggi (T)	1.259
Sangat Tinggi (ST)	4.292
Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means	

Tabel 18: Hasil Klasifikasi (*Classification Results*) Kategori KFD Propinsi Tahun 2020.

		Kategori KFD	Predicted Group Membership					Total
			SR	R	S	T	ST	
Original	Count	Sangat Rendah (SR)	7	1	1	0	0	9
		Rendah (R)	1	6	1	0	0	8
		Sedang (S)	1	2	3	2	0	8
		Tinggi (T)	0	1	1	2	1	5
		Sangat Tinggi (ST)	0	0	0	0	4	4

Sumber: Data dilah, 2021.

Tabel di atas bisa digunakan untuk menghitung akurasi prediksi dari fungsi diskriminan, yaitu sebagai berikut:

$$(7+6+3+2+4)/34 = 22/34 = 0,647 = 64,7\%$$

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Terdapat perbedaan yang signifikan kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) antara propinsi-propinsi di Indonesia, baik propinsi yang memiliki kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, maupun yang Sangat Tinggi.
- Perbedaan kategori KFD propinsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kemampuan menjelaskan variasi perbedaan

Sumber: Data diolah, 2021.

Group Centroid merupakan rata-rata nilai diskriminan dari tiap-tiap observasi di dalam masing-masing kelompok. *Group Centroid* untuk kelompok Sangat Rendah sebesar -1,958 (negative), kategori Rendah sebesar -0,990 (negatif), kategori Sedang sebesar 0,260 (positif), kategori Tinggi sebesar 1,259 (positif), dan kategori Sangat Tinggi sebesar 4,292 (positif). Hal ini berarti bahwa secara rata - rata skor diskriminan kelima kelompok berbeda cukup besar. Sehingga fungsi diskriminan yang diperoleh dapat membedakan secara baik kelompok yang ada.

Kemudian untuk hasil klasifikasi (*classification result*) bermanfaat untuk mengukur ketepatan prediksi. Tabel *classification result* adalah sebagai berikut:

Oleh karena angka ketepatan yang cukup tinggi, yaitu 64,7% (lebih dari 50%), maka model diskriminan di atas dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Dengan kata lain, model persamaan diskriminan memiliki ketepatan klasifikasi yang tinggi dan valid.

KFD propinsi di Indonesia hingga mencapai besaran 81,2% (lebih dari 50%).

- Selain itu, model persamaan diskriminan yang dihasilkan juga mampu membedakan kategori KFD dengan sangat baik dan valid, yaitu mencapai 64,7%.

6. REFERENSI

- Akbal, Muhammad. 2016. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Supremasi* XI(2): 99–107.
- Alfarabi, M Andri, M Syurya Hidayat, and Selamat Rahmadi. 2014. "Perubahan Struktur Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi." *Jurnal Andi* 1(3): 171–178.
- Astuti, Cindy Cahyaning, Akbar Wiguna, and

- Novia Ariyanti. 2021. "Pendekatan Analisis Diskriminan Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19." *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan* 15(1): 137–146.
- Fanggidae, Frts O. 2020. "Perkembangan Kapasitas Fiskal Dan Ruang Fiskal Kota Kupang 2010-2019." *Jurnal Inovasi Kebijakan* 5(1): 35–39.
- Gunawan, Rudi, Nurcahyo Budi Nugroho, and Riki Arbiyanto. 2018. "Penerapan Data Mining Untuk Estimasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pada Kota Medan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda." *Jurnal teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer (J-Sisko Tech)* 1(2): 106–113.
- Herdiyana, Deni. 2019. "Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 1(1): 112–133.
- Koerniawan, Rina Nurlaeli Rachmawati. 2020. "Peranan Sektor Lapangan Usaha Dalam Meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di Provinsi Dki Jakarta Periode Tahun 2015-2019." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6(3): 351–355.
- Mardiana, I Wayan, Made Kembar Sri Budhi, and I Wayan Yogi Swara. 2017. "Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udaya* 6(3): 414–444.
- Muhammad, Hasan. 2017. "Analisis Struktur Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Selayar." *Jurnal Economix* 5(1): 12–18.
- Oktavia, Cindi, and Nur Handayani. 2021. "Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(3): 1–20.
- Pratiwi, Maria Christina Yuli. 2021. "Analisis Ketimpangan Antarwilayah Dan Pergeseran Struktur Ekonomi Di Kalimantan." *Jurnal Borneo Administrator* 17(1): 131–154.
- Pujawati Bd, Hailudin, and Eka Agustiani. 2019. "Disparitas Antara Kebutuhan Dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1(1): 24–36.
- Putri, Adinda et al. 2021. "Perbandingan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 3(2): 25–46.
- Putri, Hana Tamara. 2020. "Covid 19 Dan Harga Saham Perbankan Di Indonesia." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(1): 6–9.
- Rahayu, Slivia. 2021. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kerinci (2008-2017)." *Jurnal Akrab Juara* 6(2): 104–115.
- Ramadhan, Trisna, I Wayan Sumarjaya, Ni Made Asih, and I Putu Eka N. Kencana. 2018. "Aplikasi Analisis Diskriminan Dalam Menentukan Keputusan Pembelian Produk McCafe (Studi Kasus: McDonald's Jimbaran Bali)." *E-Jurnal Matematika* 7(1): 50–55.
- Saparman, Syapsan, Dahlan Tampubolon. 2022. "Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011-2020." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 70–78.
- Sulfaidah, and Nurmilasari. 2021. "Tranformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng." 1(1): 23–32.
- Suryani, Yosi dan Rudy Rinaldy. 2019. "Perkembangan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2018." *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 13(10): 1639–1648.
- Susdarwono, Endro Tri. 2021. "Pengategorian Provinsi Berdasarkan Kelompok Sukses Dan Gagal Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Analisis Diskriminan." *Quadratic: Journal of Innovation and Technology in Mathematics and Mathematics Education* 1(1): 31–40.
- Syaifullah. 2021. "Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat." *Jurnal Bonanza* 1(2): 24–29.
- Widyaningsih, Atria Tiffany. 2018a. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* 7(3): 215–237.

Permenkeu, No. 126/PMK.07/2019 dan
120/PMK.07/2020 tentang Peta KFD.